

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kinerja usaha mikro di Kota Padang lebih ditentukan oleh faktor internal pelaku usaha dibandingkan faktor eksternal. Kondisi ini sekaligus mencerminkan realitas bahwa menjadi pelaku usaha mikro di Kota Padang bukanlah hal yang mudah. Pelaku usaha dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap permodalan, keterbatasan kapasitas manajerial, ketidakpastian pasar, serta tidak optimalnya dukungan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha mikro cenderung bergantung pada kemampuan dan ketahanan diri mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, orientasi kewirausahaan terbukti menjadi determinan utama yang secara konsisten mendorong peningkatan kinerja usaha mikro di Kota Padang. Sementara itu, peran kebijakan dukungan pemerintah dan kondisi lingkungan bisnis tidak menunjukkan fungsi strategis yang signifikan dalam memperkuat hubungan tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Orientasi kewirausahaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inovatif, proaktif, dan keberanian mengambil risiko yang dimiliki pelaku usaha mikro, maka semakin tinggi pula kinerja usaha yang dicapai. Hal ini disebabkan oleh peran orientasi kewirausahaan berperan sebagai kapabilitas

internal utama yang mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi, membaca peluang pasar, serta mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah dinamika persaingan.

2. Orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dukungan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha dengan orientasi kewirausahaan yang tinggi cenderung lebih aktif, responsif, dan memiliki inisiatif dalam mengakses serta memanfaatkan program dan kebijakan pemerintah. Artinya, efektivitas pemanfaatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kesiapan dan sikap proaktif pelaku usaha itu sendiri.
3. Kebijakan dukungan pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang ada belum mampu secara langsung meningkatkan pertumbuhan, pendapatan, maupun keberlanjutan usaha. Kondisi ini turut memperkuat gambaran bahwa pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya, terutama karena kebijakan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan nyata di lapangan disebabkan oleh desain kebijakan dan program pemerintah yang masih bersifat umum, formalitas, dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil pelaku usaha mikro di tingkat operasional.
4. Kebijakan dukungan pemerintah tidak memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro. Temuan ini mengindikasikan bahwa orientasi kewirausahaan mampu meningkatkan kinerja usaha mikro secara

langsung tanpa melalui peran perantara kebijakan pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kinerja usaha mikro lebih ditentukan oleh kekuatan internal pelaku usaha dibandingkan oleh intervensi kebijakan yang belum optimal dalam menjembatani hubungan tersebut.

5. Lingkungan bisnis tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha tetap konsisten, baik dalam kondisi lingkungan yang stabil maupun dinamis. Dengan kata lain, orientasi kewirausahaan merupakan faktor penentu utama yang relatif independen terhadap tekanan atau perubahan lingkungan eksternal.

## 5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, temuan penelitian memiliki implikasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, implikasi penelitian ini disajikan ke dalam dua bagian, yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis.

### 5.2.1. Implikasi Teoretis

1. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Dalam perspektif *institutional theory*, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun perilaku organisasi dipengaruhi oleh tekanan institusional, pelaku usaha mikro tetap memiliki ruang agensi dalam merespons lingkungan tersebut. Orientasi kewirausahaan dapat dipahami sebagai bentuk respons strategis terhadap lingkungan institusional yang ada, di mana pelaku usaha menafsirkan dan

menyesuaikan diri terhadap norma, regulasi, serta tekanan eksternal dengan cara yang inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya *institutional theory* dengan menunjukkan bahwa faktor internal seperti orientasi kewirausahaan tidak hanya dipengaruhi oleh institusi, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan bagaimana organisasi merespons tekanan institusional untuk mencapai kinerja yang lebih baik, khususnya dalam konteks usaha mikro di Kota Padang.

2. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan dukungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro serta tidak berperan sebagai variabel mediasi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi *institutional theory*, bahwa keberadaan institusi formal dalam bentuk kebijakan tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi maupun perubahan perilaku organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan koersif yang berasal dari pemerintah belum tentu efektif apabila tidak diiringi dengan implementasi yang tepat, relevansi kebijakan dengan kebutuhan pelaku usaha, serta tingkat internalisasi yang memadai oleh pelaku usaha mikro. Dengan kata lain, legitimasi institusional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut dipersepsikan bermakna dan mampu diadopsi dalam praktik nyata. Temuan ini mempertegas bahwa efektivitas institusi sangat bergantung pada kualitas interaksi antara kebijakan dan konteks sosial-ekonomi tempat usaha mikro beroperasi.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan bisnis tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara orientasi kewirausahaan dan

kinerja usaha mikro. Dalam kerangka *institutional theory*, hal ini mengindikasikan bahwa tekanan institusional yang berasal dari lingkungan eksternal, baik dalam bentuk tekanan mimetik maupun normatif, belum cukup kuat atau belum terinternalisasi secara signifikan dalam memengaruhi hubungan tersebut. Kondisi ini dapat mencerminkan bahwa pelaku usaha mikro di Kota Padang cenderung lebih mengandalkan interpretasi dan strategi internal mereka dibandingkan mengikuti pola homogenitas (isomorphism) yang berkembang di lingkungannya. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, terutama pada usaha mikro di negara berkembang, proses institusionalisasi belum sepenuhnya mendorong keseragaman perilaku organisasi, sehingga pengaruh tekanan eksternal menjadi relatif terbatas dibandingkan dengan peran respons strategis internal pelaku usaha.

### 5.2.2. Implikasi Praktis

#### 1. Bagi pelaku usaha mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan pelaku usaha mikro di Kota Padang berada pada kategori baik, dengan kekuatan utama pada aspek inovativitas, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi usaha dan menerapkan ide atau perbaikan baru pada produk maupun layanan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan dioptimalkan sebagai modal utama dalam meningkatkan kinerja usaha, dapat dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap proses produksi, memanfaatkan teknologi sederhana untuk menekan biaya operasional,

serta dapat dilakukan dengan pengembangan produk secara bertahap sesuai dengan umpan balik konsumen dan kebutuhan pasar.

Namun demikian, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku usaha cenderung masih berhati-hati dalam mengambil inisiatif tindakan saat munculnya suatu masalah. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro perlu meningkatkan kemampuan bertindak secara antisipatif, seperti melakukan perencanaan usaha sederhana, memantau tren pasar secara rutin, serta berani melakukan uji coba skala kecil terhadap strategi atau inovasi baru.

Selain itu, pelaku usaha mikro perlu mengelola keberanian dalam mengambil risiko dengan lebih terukur dan strategis agar dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha. Pelaku usaha mikro disarankan untuk tidak hanya berani mencoba hal baru, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan peluang secara lebih sistematis dalam setiap keputusan usaha. Pendekatan ini dapat membantu pelaku usaha meminimalkan potensi kerugian sekaligus memaksimalkan peluang peningkatan kinerja usaha.

Lebih lanjut, tingginya kecenderungan pelaku usaha mikro dalam mengikuti pelatihan dan mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh menunjukkan adanya kemauan untuk berkembang. Namun, agar orientasi kewirausahaan yang dimiliki dapat berdampak optimal terhadap kinerja usaha, pelaku usaha mikro perlu memastikan bahwa hasil pelatihan tersebut benar-benar diintegrasikan ke dalam praktik usaha sehari-hari, bukan hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan. Dengan menggabungkan inovativitas yang sudah kuat, peningkatan proaktivitas, serta pengelolaan risiko yang lebih matang, pelaku usaha mikro diharapkan mampu

mengubah potensi kewirausahaan yang dimiliki menjadi kinerja usaha yang lebih berkelanjutan.

## 2. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan program pengembangan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kemudahan proses perizinan usaha sudah berjalan dengan baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan birokrasi perizinan telah memberikan dampak positif dan perlu terus dipertahankan sebagai fondasi dalam mendukung legalitas dan kelancaran operasional usaha mikro. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kemudahan perizinan tersebut terintegrasi dengan sistem layanan lanjutan, sehingga pelaku usaha tidak berhenti hanya pada tahap legalitas, tetapi dapat langsung terhubung dengan ekosistem pengembangan usaha.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek dukungan keuangan belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha mikro. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah konkret dengan membangun skema pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif, seperti penyediaan skema penjaminan kredit daerah untuk menurunkan risiko pembiayaan usaha mikro, serta pengembangan alternatif pembiayaan berbasis komunitas atau kemitraan misalnya koperasi sektor riil dan pembiayaan berbasis rantai pasok.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membentuk layanan terpadu akses pembiayaan di tingkat kota/kecamatan yang berfungsi sebagai pusat konsultasi, asistensi pengajuan kredit, hingga pendampingan kelayakan usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya “diberi informasi”, tetapi benar-benar didampingi hingga memperoleh akses pembiayaan.

Penguatan kebijakan juga perlu diarahkan pada peningkatan literasi keuangan pelaku usaha mikro melalui program yang lebih aplikatif, seperti pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis digital, simulasi pengajuan kredit, serta edukasi manajemen arus kas. Program ini sebaiknya tidak bersifat satu arah, tetapi menggunakan pendekatan *learning by doing* dan berbasis kasus usaha nyata yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Padang.

Lebih lanjut, rendahnya pemanfaatan layanan pendampingan menunjukkan bahwa peran pendamping UMKM belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan reformulasi sistem pendampingan UMKM, dengan langkah-langkah seperti menetapkan standar kompetensi dan indikator kinerja pendamping berbasis *outcome* (misalnya peningkatan omzet, akses pasar, atau akses pembiayaan UMKM binaan), lalu mengintegrasikan pendampingan dengan program inkubasi bisnis berbasis sektor unggulan daerah (seperti kuliner, kerajinan, dan agroindustri), serta memanfaatkan platform digital untuk monitoring aktivitas pendampingan secara *real-time*.

Pendampingan juga perlu bergeser dari pendekatan administratif menjadi pendampingan fungsional dan strategis, yang mencakup pengembangan model

bisnis, strategi pemasaran digital, inovasi produk, serta kesiapan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu lebih menitikberatkan pada penguatan kapabilitas internal pelaku usaha, khususnya orientasi kewirausahaan. Program pengembangan sebaiknya dirancang dalam bentuk tahapan pengembangan usaha yang jelas, mulai dari usaha rintisan, bertumbuh, hingga naik kelas. Dalam setiap tahap, pelaku usaha diberikan intervensi yang berbeda, seperti pelatihan inovasi produk, akses pasar, hingga fasilitasi kemitraan dengan usaha yang lebih besar.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemerintah Kota Padang juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak. Evaluasi kebijakan tidak hanya didasarkan pada jumlah program atau jumlah UMKM binaan, tetapi pada indikator kinerja nyata, seperti peningkatan omzet, profitabilitas, daya tahan usaha, serta kemampuan ekspansi pasar. Data ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis kebutuhan riil, dan berorientasi pada hasil, kebijakan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya hadir sebagai regulasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha mikro di Kota Padang.

### 3. Bagi lembaga pendamping, lembaga pembiayaan, dan komunitas UMKM

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketika kebijakan formal pemerintah belum mampu berperan efektif dalam meningkatkan kinerja usaha mikro, peran lembaga pendamping, lembaga pembiayaan, dan komunitas UMKM menjadi semakin strategis sebagai aktor penghubung antara orientasi kewirausahaan pelaku

usaha mikro dan praktik usaha yang produktif. Pendampingan non formal yang lebih intensif, kontekstual, dan berkelanjutan diperlukan untuk membantu pelaku usaha mikro menerjemahkan sikap inovatif, proaktif, dan keberanian mengambil risiko ke dalam pengelolaan usaha yang nyata dan terukur.

Lembaga pendamping diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan program, tetapi juga pada pendampingan fungsional yang menyentuh kebutuhan inti pelaku usaha mikro, seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Pendekatan pendampingan yang lebih personal dan berbasis masalah usaha aktual dinilai penting untuk mengatasi kecenderungan pelaku usaha mikro yang masih berhati-hati dalam bertindak proaktif, sebagaimana tercermin dalam hasil analisis orientasi kewirausahaan.

Selanjutnya, lembaga pembiayaan diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga pendamping dan komunitas UMKM dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik usaha mikro. Skema pembiayaan yang disertai pendampingan usaha dinilai lebih relevan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan meminimalkan risiko kegagalan, sehingga dukungan keuangan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha mikro.

Sementara itu, komunitas UMKM memiliki peran penting sebagai ruang pembelajaran kolektif, pertukaran informasi, dan penguatan jejaring usaha. Melalui komunitas, pelaku usaha mikro dapat memperoleh referensi pasar, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil inisiatif usaha.

Kolaborasi yang terintegrasi antara lembaga pendamping, lembaga pembiayaan, dan komunitas UMKM diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendukung usaha mikro di Kota Padang, sehingga orientasi kewirausahaan yang telah dimiliki pelaku usaha mikro dapat dioptimalkan secara lebih efektif dalam mendorong peningkatan kinerja usaha.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan menarik implikasi penelitian. Adapun keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Objek penelitian terbatas pada usaha mikro di Kota Padang, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke dalam konteks wilayah lain atau pada skala usaha kecil dan menengah yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Pengukuran variabel dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi responden melalui kuesioner terstruktur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *response bias*, terutama karena penilaian kinerja usaha, tingkat orientasi kewirausahaan, serta persepsi terhadap kebijakan dukungan pemerintah bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman serta pemahaman masing-masing pelaku usaha.
3. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada rentang waktu tertentu, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika perubahan orientasi kewirausahaan, kebijakan dukungan pemerintah, lingkungan bisnis, serta kinerja usaha mikro dari waktu ke waktu, akibatnya, pengaruh variabel penelitian dalam jangka panjang belum dapat dianalisis secara mendalam.

4. Hasil wawancara langsung pada penelitian ini hanya dibatasi pada jumlah yang relatif kecil, sehingga temuan kualitatif dalam penelitian ini lebih berfungsi sebagai penguat dan ilustrasi terhadap hasil kuantitatif, bukan sebagai dasar generalisasi temuan penelitian.

#### 5.4. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian yang akan datang, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah dan skala usaha, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komparatif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti literasi keuangan, digitalisasi UMKM, atau kemampuan manajerial, guna memperkaya model penelitian dan menjelaskan kinerja usaha mikro secara lebih holistik.
3. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal agar dapat menangkap perubahan perilaku kewirausahaan dan kinerja usaha mikro secara lebih komprehensif dari waktu ke waktu.
4. Pendekatan *mixed methods* dapat dipertimbangkan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan dukungan pemerintah dan lingkungan bisnis benar-benar dirasakan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro.